

Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004

Ahmad Zaki Fadlur Rohman*

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk melacak kembali konseptualisasi faksi dalam studi partai politik. Faksionalisasi adalah fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik. Dalam konteks partai di Indonesia, bentuk faksionalisasi terjadi di PKB. Ketika faksionalisasi semakin tajam dalam PKB tidak dapat dikelola dengan baik, maka ada bola liar yang menyebabkan pembentukan PKNU. Kelahiran PKNU ini merupakan bentuk nyata dari faksionalisasi yang terjadi di PKB. Kelahiran PKNU adalah bukti bahwa faksionalisasi di tubuh PKB tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Ini merupakan indikasi bahwa organisasi partai politik tidak adaptif terhadap pandangan yang berbeda dan garis politik di PKB. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pelebagaan PKB namun kokoh dan kuat dalam dinamika bergolak mengelola di tubuhnya sendiri.

Kata kunci: Faksionalisasi, PKB, PKNU dan Pilpres

Abstract

This article attempts to trace back conceptualization of the factions in the study of political parties. Factionalization is a phenomenon that is often present in the body of a political party. In the context of the party in Indonesia, factionalization form occurs in the PKB. When factionalization increasingly sharp in the PKB can not be managed well, then there is a wild ball which led to the formation of PKNU. Birth PKNU This is a clear form of factionalization that occur in the PKB. The birth of PKNU is evidence that factionalization in the body of PKB can not be controlled and managed properly. This is an indication that the organization of political parties is not adaptive to different views and political line in the PKB. Thus, it can be said that the process of institutionalization PKB yet sturdy and strong in managing turbulent dynamics in his own body.

Keywords: factionalization, PKB, PKNU and election

***Korespondensi:**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145
Email: ahmadzakifr@ub.ac.id

Pendahuluan

Pasca reformasi yang ditandai oleh lengsehnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 memberikan dampak yang signifikan terhadap studi tentang Indonesia. Sebelum reformasi, studi tentang Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan politik memfokuskan pada kajian tentang negara. Mulai dari perdebatan antara Harry J. Benda dan Herbert Feith tentang kemunduran demokrasi konstitusi di Indonesia pasca munculnya demokrasi terpimpin dibawah Soekarno. Dilanjutkan studi tentang Orde Baru seperti “*Bemtenstaat*” Ruth T. Mc Vey, “*Bureaucratic Polity*” Karl D Jackson, dan “*Patromonial State*” yang di Indonesia lebih banyak dipopulerkan oleh Emmerson, Liddle, Crouch, dan Brown. Dengan demikian, konteks politik rezim otoritarianisme pada zaman orde baru menyebabkan kajian tentang politik di Indonesia semua fokus pada lembaga eksekutif.

Fokus kajian tentang Indonesia yang banyak mengkaji tentang “negara” di tingkat eksekutif birokrat, pasca reformasi mulai fokus pada kajian tentang partai politik. Hal ini tidak lepas dari efouria politik yang diekspresikan melalui pendirian partai politik sebagai instrumen penting dalam meraih kekuasaan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Lokus kekuasaan yang dulu pada masa Soeharto berpusat pada poros eksekutif birokrat dan militer beralih pada kekuasaan ditangan para elite-politik yang berada di partai politik. Oleh karena itu, kajian tentang partai politik pasca reformasi menjadi sangat menarik dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia.

Kajian tentang partai politik di Indonesia tidak pernah lepas dari fenomena faksionalisme partai politik. Menjamurnya partai politik di Indonesia sering kali merupakan implikasi dari gejala faksionalisme. Tiga partai politik yang ada dibawah rezim orde baru, yaitu Golkar, PPP, dan PDI merupakan induk partai di Indonesia yang pecah menjadi beberapa partai pada pemilu tahun 1999. Dalam kasus partai PPP yang menjadi pelabuhan politik terakhir bagi kelompok Islam sejak adanya kebijakan fusi partai pada tahun 1973, pada pemilu tahun 1999 pecah menjadi banyak partai berlabel Islam seperti PAN, PKB, PNU, PKU, dan Masyumi.

Dalam studi tentang faksionalisme intra partai, perkembangan faksi-faksi didalam partai sangat ditentukan oleh faktor internal partai maupun faktor eksternal partai seperti *setting* sosial dan politik. Perbedaan konteks sosial dan politik dapat memberikan perubahan pola faksionalisme yang terjadi didalam internal partai. Pada konteks politik di Indonesia pasca transisi demokrasi Tahun 1998, faktor eksternal terkait kondisi *setting* sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap pola faksionalisme partai. Konteks transisi demokrasi di Indonesia pasca tumbanganya rezim Soeharto, setidaknya ada dua agenda utama reformasi, yaitu perubahan sistem kepartaian dan pemilu ulang. Sistem kepartaian merupakan agenda utama reformasi dalam mengembalikan hak-hak politik masyarakat Indonesia yang telah lama dimonopoli oleh partai penguasa Orba melalui pendirian partai baru. Sedangkan pemilu menjadi agenda

utama reformasi dalam proses pergantian (*transplacement*) pemerintahan baru atau rezim *demokratik* menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang.

Dalam tulisan ini akan menjelaskan kristalisasi faksionalisme yang ada di internal PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pasca Pilpres 2004 Tahun 2004 sehingga lahir partai baru pecahan PKB, yaitu Partai Kebangkitan nasional Ulama (PKNU). Pendirian PKNU tidak lepas dari dinamika internal PKB yang mengurucut pada polarisasi antara PKB “Gus Dur” dan PKB “Ulama”. Masing-masing kubu sempat membuat kongres masing-masing sehingga menghasilkan dualisme kepengurusan pada akhir tahun 2005. Meskipun dalam pengadilan PKB “Ulama” dikalahkan oleh PKB “Gus Dur”, namun pada pemilu tahun 2009 bertransformasi menjadi PKNU. Dalam hal ini, konteks politik pilpres 2004 menjadi titik balik dari konsolidasi PKB sehingga muncul perpecahan antara PKB Gus Dur dan PKB “Ulama” yang berubah menjadi PKNU. Oleh karena itu, dinamika faksionalisme internal di tubuh PKB sehingga lahir PKNU akan menjadi fokus dalam penulisan paper ini.

Dengan mengkaji tema faksionalisme partai politik pasca reformasi di Indonesia dengan kasus PKB, setidaknya ada sumbangan akademik dalam melihat geliat faksionalisme partai politik pasca reformasi. Kajian ini juga turut memperkuat argumentasi para Indonesianis dalam melihat demokratisasi di Indonesia telah mengarah pada sistem *oligarki* dimana sistem pemerintahan yang didasarkan atas elite-elite politik. Dalam konteks ini, partai politik yang menjadi aktor demokratisasi ternyata sistem internalnya sangat *oligarkis*. Gejala *oligarki* ini dapat dilihat dari gejala faksionalisme partai politik yang kemunculannya sangat elitis maupun personal. Oleh karena itu, kristalisasi faksionalisme dalam kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi kajian penting dalam melihat Indonesia pasca reformasi.

Tulisan ini secara garis besar dibagi menjadi empat bagian besar. **Pertama, pendahuluan.** Dalam sub bagian ini akan dijelaskan latar belakang dan relevansi kajian tentang faksionalisme partai politik sehingga tema ini penting untuk dikaji dalam melihat Indonesia pasca reformasi. **Kedua, kerangka konseptual.** Dalam sub bagian ini akan dijelaskan kerangka konseptual tentang faksionalisme partai politik, mulai dari karakter dasar faksi, tipologi faksi, faktor pembentukan faksi, hingga proses kristalisasi faksi. **Ketiga, pembahasan.** Dalam bagian sub bagian ini akan dijelaskan tentang kontekstualisasi dari kerangka konseptual yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Diawali dengan penjelasan relasi antara PKB dan NU yang menyebabkan munculnya faksi-faksi menjelang Pilpres 2004. Selanjutnya akan dijelaskan kristalisasi faksi-faksi yang ada di PKB mulai dari fragmentasi faksi, institusionalisasi faksi dan polarisasi faksi. Pada bagian terakhir, yaitu **kesimpulan**, akan merefleksikan kristalisasi faksionalisme sehingga dapat diambil *lesson learned* dalam tulisan ini.

Konseptualisasi Faksionalisme Partai Politik

Dalam sub bab ini akan menjelaskan kerangka dasar dalam memahami teoritisasi tentang faksionalisme internal partai yang dirujuk melalui tulisan Patrick

Kolner & Matthias Basedau yang berjudul *Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies*. Studi tentang faksionalisme politik didalam internal partai merupakan kajian tersendiri dalam teori partai politik. Faksionalisme politik merupakan sebuah *keniscayaan* didalam kebanyakan partai politik. Hal ini disebabkan karena partai politik bukanlah sebuah *entitas* tunggal yang memiliki tujuan dan consensus politik yang *monolitik*. Akan tetapi, partai politik merupakan sebuah *entitas* kolektif yang sarat dengan kompetisi dan *pluralitas* kepentingan diantara individu-individu didalamnya sehingga melahirkan sebuah pandangan, tujuan, dan kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Konsensus politik diantara individu-individu didalam partai yang memiliki pandangan, tujuan dan kepentingan yang sama akan terbentuk sebuah “blok” atau kelompok didalam partai politik. Blok inilah yang disebut dengan *faksi* di internal partai politik (Basedau dan Kolner, 2005).

Definisi Faksi dan Tipologi Faksionalisme

Secara *etimologi* (bahasa), istilah “faksi” didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “*kelompok di dalam suatu partai politik, yg umumnya anggotanya para politisi yg mencoba menonjolkan diri dng cara-cara oportunistis atau dengan cara mendorong perpecahan di dalam partai politiknya, bahkan di dalam negara secara keseluruhan*”. Sedangkan secara *epistimologi* (istilah), Faksi menurut Beller dan Belloni adalah “*setiap kelompok yang terorganisir dan eksis dalam berhadapan dengan kelompok lain dan berkompetisi dengan lawan dalam kelompok yang lebih besar*”. Sedangkan menurut Kollner dan Basedau, faksi adalah “*setiap pengelompokan intrapartai yang eksis dalam satu kurun waktu, memiliki organisasi minimal, menunjukkan kesadaran kelompok, secara aktif mengejar tujuan politik, dan dapat dilihat sebagai blok dalam partai*” (KBBI, 2011). Dengan demikian, dari ketiga devinisi diatas, istilah “faksi” dapat disimpulkan sebagai setiap kelompok yang (1) menunjukkan kesadaran kelompok, (2) memiliki organisasi minimal, (3) eksis dalam beberapa jangka waktu tertentu, (4) aktif mengejar tujuan politik, dan (5) dapat dikatakan sebagai blok dalam partai.

Salah satu bagian dari konseptualisasi faksionalime internal partai adalah tipologi faksi-faksi yang muncul didalamnya. Penjelasan mengenai tipe atau karakter khusus yang dibangun didalam faksi dapat dilihat dari sifat khusus organisasi faksi yang terbentuk atas dasar factor-faktor tertentu. Dalam hal ini, tipe faksi yang sering kali muncul ada tiga bentuk, yaitu (1) faksi yang terbentuk atas dasar kepentingan (*factions of interest*), (2) faksi yang terbentuk atas dasar hubungan personal (*factions of personalized*), dan (3) faksi yang terbentuk atas aturan organisasi yang terikat secara institusional (*factions of institutionalized*) (Patrick Kollner & Matthias Basedau, 2005: 8). Dari ketiga pola faksionalisme internal partai tersebut, faksi “kepentingan” dan faksi

“personal” adalah pola faksi yang sering kali dijumpai dalam dinamika partai politik yang ada didalam negara berkembang atau negara yang demokrasinya belum mapan. Sedangkan pola faksi “institusionalisasi” hanya terdapat didalam dinamika internal partai politik di negara yang sistem demokrasinya telah mapan (Patrick Kollner & Matthias Basedau, 2005: 12). Oleh karena itu, penjelasan mengenai faksi “kepentingan” dan faksi “personal” menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.

Pola paling sederhana didalam dinamika faksionalisme internal partai adalah pola faksionalisme yang dibentuk atas dasar “kepentingan” (*factions of interest*). Di dalam jenis faksionalisme seperti ini, faksi yang ada merupakan faksi yang dibentuk dengan tanpa terorganisir secara matang dan cenderung mengejar sebuah isu tertentu untuk memenangkan kepentingan kelompok mereka. Karakter dasar dari pola faksionalisme jenis ini adalah adanya isu-isu strategis yang sedang diperjuangkan tanpa adanya organisasi secara matang yang ada didalam masing-masing faksi. Karena tidak ada organisasi secara matang, faksi-faksi yang ada didalamnya tidak memiliki struktur hierarkis yang jelas sehingga tidak mampu memiliki ruang publik secara formal. Selain itu, faksionalisme yang terjadi atas pola kepentingan tidak bisa berdiri pada batas waktu yang lama karena eksistensinya sejalan dengan isu-isu strategis yang sedang diperjuangkan (Basedau dan Kolner, 2005).

Pola faksionalisme selanjutnya adalah faksionalisme yang terbentuk atas dasar hubungan personal (*Factions of Personal*). Pola faksionalisme personal sebenarnya hampir sama dengan pola faksionalisme yang terbentuk atas dasar “kepentingan” (*Factions of interest*). Namun, yang membedakan dengan pola faksionalisme “kepentingan” adalah adanya kekuatan personal yang muncul didalam faksi-faksi yang ada sehingga eksistensi faksi didalamnya tergantung pada eksistensi personal. Jenis pola faksionalisme “personal” sangat kental dengan jaringan *klientalistik* yang dibangun oleh patron yang ada didalam faksi. Dengan adanya “patron” didalam faksi maka sistem organisasinya cenderung “hierarkis” dan rantai komandonya bersifat vertical. Adapun identitas faksi-faksi yang ada dalam pola faksionalisme “personal” cenderung dilekatkan pada seorang yang memiliki sumber daya seperti pemimpin kelompok. Oleh karena itu, eksistensi faksi-faksi yang ada dalam pola faksionalisme “personal” sangat bergantung pada eksistensi pemimpin faksi (Basedau dan Kolner, 2005).

Faktor Pembentukan Faksionalisme

Studi tentang faksionalisme dalam partai partai telah banyak membahas tentang factor yang dianggap dapat mendorong muncul dan berkembangnya faksi, baik factor internal partai maupun factor eksternal seperti setting sosial dan politik. Adapun kombinasi kedua factor tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori (Basedau dan Kolner, 2005).

Pertama, dinamika dan struktur sosial-ekonomi dan politik secara umum. Dalam kondisi masyarakat yang ditandai oleh hubungan klientalistik yang kuat atau perpecahan

yang tegas sering kali terlihat didalam *factions of interest*. Di sisi lain, tingkat pembangunan yang rendah dan meningginya kepentingan untuk mengakses sumber daya dapat memicu munculnya faksi. Pada tingkatan yang sama sekali berbeda, butuh isu politik khusus yang konflikatif (berpeluang menimbulkan konflik) untuk memicu munculnya faksi.

Kedua, institusi formal Negara seperti sistem pemilu dan struktur negara. Karakteristik formal struktur negara dan sistem pemerintahan membentuk struktur pendorong yang berbeda pada pendirian faksi. Pemilihan presiden langsung yang dibantu dengan wewenang eksekutif yang kuat membawa bagian elemen pribadi ke dalam konflik politik sehingga memicu adanya *factions of personalized*. Pemilu dapat meningkatkan perbedaan dalam internal organisasi ketika pendukung berkumpul di sekitar kandidat yang menguntungkan dalam fase nominasi. Selain itu, sistem pemilihan proporsional memberikan kerangka institusional yang menyetujui pembentukan dan perkembangan faksi. Bahkan dalam beberapa kasus pada sistem pemilu majoritarian tidak menutup kemungkinan munculnya faksi.

Ketiga, karakteristik sistem kepartaian dan partai. Adanya sistem kepartaian yang memberikan ruang bagi munculnya banyak partai baru dapat mempengaruhi pembentukan faksi. Karakteristik umum sistem kepartaian dapat juga mempengaruhi pembentukan faksi baik ditingkat polarisasi antar partai maupun konflik ideologi di dalam partai. Dengan adanya sistem kepartaian tersebut, seringkali pembentukan faksi terjadi pada parta-partai besar yang berpotensi untuk melahirkan partai baru dari munculnya faksi baru di dalam partai tersebut. Oleh karena itu, fenomena faksionalisme sering kali terjadi pada partai besar atau dominan.

Kristalisasi Faksionalisme

Kristalisasi faksionalisme merupakan puncak dari proses pembentukan faksi-faksi yang ada didalam internal partai setelah melalui tiga tahapan, yaitu *fragmentasi faksional*, *institusionalisasi faksional*, dan *Polarisasi faksional* (Basedau dan Kolner, 2005). Tahapan pertama dalam perkembangan faksi adalah *fragmentasi faksionalisme*. Pada tahap ini dapat dideteksi melalui jumlah faksi yang muncul apakah faksi yang muncul tersebut mengarah ke sistem faksionalisme bipolar (dua faksi) atau multipolar (ada banyak jumlah faksi). Sedangkan kekuatan faksi dalam tahap ini dapat dilihat apakah mengarah pada faksionalisme *simetris* yang kekuatan berimbang diantara faksi-faksinya, atau faksionalisme (A-) *simetris* yang kekuatannya tidak berimbang. Selain itu, tekanan vertical faksionalisme pada tahap *fragmentasi* dapat dilihat melalui faksionalisme yang terjadi ditingkat pusat.

Tahapan karakteristik faksionalisme yang kedua adalah *institusionalisasi faksional*. Tahapan ini merupakan proses institusionalisasi faksi-faksi yang ada sehingga mengerucut menjadi beberap faksi yang memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam tahap *institusionalisasi faksional*, derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas

(keterikatan) disesuaikan dengan pola faksionalisme yang ada. Pada pola faksionalisasi “kepentingan”, derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas cenderung rendah sehingga pola faksionalisme semacam ini cenderung tidak bertahan pada jangka waktu yang lama. Sedangkan pada pola faksionalisme “personal”, derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas cenderung sedang sehingga mampu bertahan dalam jangka yang cukup lama. Sedangkan pada pola faksionalisme “institusional”, derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas cenderung tinggi sehingga mampu bertahan lama dibandingkan pola faksionalisme “kepentingan” dan “personal”.

Tahapan karakteristik faksionalisme yang terakhir adalah *polarisasi faksional*. Pada perkembangan faksionalisme tahap ini, faksi-faksi yang ada didalam partai sudah mengkristal menjadi faksi-faksi sendiri yang memiliki intensitas konflik cukup tinggi sehingga kemungkinan untuk tahap pemisahan sangat besar. Kristalisasi diantara faksi-faksi yang ada didalam partai politik dapat diukur dari intensitas konflik antar faksi apakah cenderung tinggi atau rendah. Selain itu, pada tahap ini, bisa dilihat perbedaan ideologi yang ada diantara faksi-faksi. Dan yang terakhir adalah dinamika kompetisi interfaksional menjadi momentum utama didalam melihat *eskalasi* konflik yang terjadi diantaranya faksi-faksi yang ada apakah ada pemisahan atau tidak.

Lahirnya PKB Sebagai Kendaraan Politik NU Pasca Reformasi

Tumbangnya rezim Soeharto yang diawali dengan krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 telah membuka pintu *liberalisasi politik* di Indonesia sehingga terjadi *euforia* politik rakyat yang telah lama terkooptasi oleh system otoritarianisme Orde Baru. Di level elite politik, luapan politik mereka diekspresikan dengan mendirikan partai untuk merespon pemilu pertama kali pasca transisi pada tahun 1999. Tercatat sebanyak 148 partai yang terdaftar sebagai partai politik meskipun hanya 48 yang lolos seleksi Tim 11, yaitu panitia yang dipercaya pemerintah untuk menyeleksi partai-partai yang layak ikut pemilu tahun 1999. Pendirian partai-partai baru juga dilakukan di dalam lingkungan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu dilingkungan elite-elite NU (Nahdlatul Ulama). Mengingat NU memiliki massa yang cukup besar, pendirian parta-partai yang mengatasnamakan NU tidak bisa dihindari. Tercatat ada empat partai politik yang mengusung bendera NU, yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa, PKU (Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummah), dan SUNI (Serikat Uni Nasional Indonesia) (Imam Baehaqi, 1999:56).

PKB merupakan satu-satunya partai politik NU yang proses pembentukannya difasilitasi secara langsung oleh PBNU. Gencarnya arus dari bawah yang menghendaki agar NU segera membentuk partai politik yang *under control* NU, direspon oleh Gus Dur dengan membentuk Tim Lima melalui rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Guna mempercepat kinerja Tim Lima yang bertugas untuk

memenuhi aspirasi warga NU dalam membentuk partai politik, maka dibentuk tim asistensi yang berjumlah sembilan orang. Tim Asistensi ini membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan warga NU untuk mendirikan parpol baru. Setelah mengadakan berbagai diskusi dan pertemuan, Tim Lima dan Tim Asistensi merampungkan tugasnya dan menyerahkan hasil akhir rancangan pembentukan parpol tersebut kepada rapat harian *Syuriah* dan *Tanfidziyah* PBNU tanggal 22 Juli 1998. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli 1998, lahirlah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang dipimpin langsung oleh Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) sekaligus masuk aktif sebagai Ketua Umum PBNU (Al-Zastrouw, 1999:34).

Mengingat PKB menjadi satu-satunya partai NU yang proses pendiriannya difasilitasi langsung oleh PBNU dan diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi politik warga NU, maka komposisi pengurusnya juga tidak jauh dari elite-elite struktural NU. Pasca terbentuknya PKB sebagai partai politik yang diklaim mewakili suara aspirasi politik NU, maka PBNU memberikan instuksi kepada seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang NU, untuk secepatnya membantuk DPW (Dewan Pengurus Wilayah) dan DPC (Dewan Pengurus Cabang) PKB. Sejak saat itu, NU telah melahirkan lembaga baru yang komposisi susunan pengurusnya merupakan bagian dari pengurus NU baik dari unsur pengurus tanfidliyah dan Syuriah NU maupun unsur badan otonom NU (Laode Ida, 1996:56). Dengan demikian, pada masa awal berdirinya PKB sebelum Muktamar ke-30 di Lirboyo, NU dan PKB secara structural merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan meskipun dalam wadah lembaga yang berbeda.

Fragmentasi Faksionalisme PKB: *Conflict Interest* Menjelang Pilpres 2004

Dalam konsep kristalisasi faksionalisme partai politik, fragmentasi faksi merupakan awal dari tahapan menuju pembelahan partai politik. Pada proses fragmentasi faksi, kondisi internal partai sering kali muncul ketegangan politik yang ditandai oleh konflik kepentingan diantar elite-elite yang ada didalamnya. Dalam kasus partai PKB, konteks politik menjelang Pilpres 2004 menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculan faksi-faksi di PKB. Selain itu faktor internal PKB yang tidak dipisahkan dari keterlibatan ormas islam NU turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan faksi di PKB.

Sebagai partai yang dibentuk oleh NU, dinamika internal PKB tidak pernah lepas dari pengaruh pengurus NU. Keduanya sama-sama memiliki massa *nahdliyyin* (warga NU) yang loyal terhadap para kiai-kiai NU. Mengingat ada budaya *patronase* yang didalam warga NU, faksi-faksi yang terbangun dalam PKB sangat personal (Zamakhsari Dofier, 1990:65). Peran tokoh yang ada di PKB dan NU menjadi figur penting dalam proses fragmentasi faksi di PKB. Meskipun PKB sudah lekat dengan

figur Gus Dur, namun hadirnya kiai-kiai karismatik yang ada di PKB tidak bisa anggap sebelah mata. Mereka memiliki ribuan ummat di daerah masing-masing hingga turut andil dalam perolehan suara PKB pada pemilu 2004. Kebanyakan para kiai-kiai itu duduk sebagai dewan penasehat (Mustasyar) PKB. Peran mereka cukup kuat dalam proses pengambilan kebijakan di PKB, khususnya PKB di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Fuad Anwar, 2004:35). Kedua daerah ini merupakan lumbung suara terbesar PKB yang sebageaian besar adalah warga NU.

Perkembangan faksionalisme PKB sehingga muncul partai PKNU berawal dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara elite NU dan PKB menjelang Pilpres 2004. Tidak adanya kesepakatan antara NU dan PKB dalam penentuan nama-nama yang mengikuti pencalonan Pilpres mendorong munculnya banyak faksi di PKB. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa PKB dan NU seperti dua gambar mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun sudah ada pembagian antara pengurus NU dan PKB, namun dalam prakteknya tetap saja elite-elite NU yang duduk di dalam struktur organisasi tetap memiliki jabatan di PKB, khususnya para kiai khos (para penasehat PKB). Hal ini yang memfasilitasi kemunculan faksi-faksi di PKB.

Jauh sebelum partai-partai lain mengumumkan calon presiden yang diajukan pada Pilpres 2004, PKB sudah terlebih memproklamasikan Gus Dur sebagai calon presiden. Pencalonan ini ternyata tidak didukung oleh sejumlah kiai-kiai NU seperti KH. Idris Marzuki selaku anggota Musytasar (penasehat) PKB sekaligus Musytasar NU. Bahkan, sejumlah kiai-kiai NU dalam pertemuan 1000 kiai di Jakarta turut menolak pencalonan Gus Dur pada Pilpres 2004. Mereka berdalih bahwa Gus Dur secara hukum Islam tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin karena dianggap tidak memenuhi syarat sehat secara jasmani (Nur Kholiq, 2004:25). Karena saat itu kondisi kesehatan pengeliatan Gus Dur sudah sangat kritis. Langkah ini dinilai oleh kelompok Gus Dur sebagai upaya gerakan politik untuk menjegal Gus Dur maju dalam Pilpres 2004 dan ada indikasi lain untuk mencalonkan nama lain didalam elite NU. Dalam hal ini Hasyim Muzadi santer disebutkan sebagai calon presiden yang diajukan oleh kiai-kiai NU.

Wacana para kiai dalam mencalonkan Hasyim Muzadi menjadi sangat jelas ketika muncul usulan dari para peserta rapat pleno PBNU supaya Hasyim Muzadi menjadi wakil NU dalam Pilpres 2004. Tentu wacana ini semakin memperkeruh dinamika internal PKB menjelang Pilpres 2004. Sebagian besar pengurus PKB masih loyal pada keputusan Gus Dur untuk mencalonkan diri sebagai Capres PKB. Namun tidak sedikit dari pengurus PKB yang memiliki hubungan erat dengan para Kiai-Kiai NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah mendukung pencalonan Hasyim Muzadi sebagai Capres NU. Praktis kondisi internal PKB menjelang Pilpres 2004 terjadi ketegangan antara kubu Pro Gus Dur dan Pro Hasyim Muzadi. Ketegangan kedua kelompok ini mendapatkan respon keras dari Gus Dur sebagai pemegang jabatan tertinggi di PKB. Terlebih lagi ketika KPU menjegal Gus Dur pada saat pendaftaran calon presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani (Fuad Anwar, 2004:45).

Tentu hal ini mendorong Gus Dur untuk melakukan konsolidasi kelompoknya di internal PKB. Upaya konsolidasi Gus Dur diinternal PKB tanpa disadari mendorong perkembangan faksionalisme PKB kepada tahap *institusionalisasi faksi* yang nantinya akan lahir PKNU.

Institusionalisasi Faksionalisme PKB : Dualisme Muktamar Antara PKB “Ulama” dan PKB “Gus Dur”

Institusionalisasi faksionalisme merupakan tahapan lanjutnya dalam proses kristalisasi faksi sehingga muncul PKNU sebagai partai sempalan PKB. Sebagaimana yang dijelaskan pada proses fragmentasi faksi pada Pilpres 2004, dinamika internal PKB saat itu terbelah menjadi dua faksi besar, yaitu faksi pendukung pencalonan Gus Dur dan faksi pendukung Hasyim Muzadi yang dimotori oleh beberapa kiai karismatik. Sebagai pimpinan partai, Gus Dur dan faksinya berada diatas angin untuk melakukan pembersihan terhadap faksi pendukung Hasyim Muzadi yang kebanyakan adalah pengurus partai di tingkat propinsi, khususnya Jawa Timur. Meskipun begitu, bukan berarti kekuatan beberapa kiai karismatik dianggap sebelah mata. Ketika mereka mengkonsolidasikan diri sebagai sebagai faksi di PKB maka akan memperkuat fragmentasi faksi ketahap institusionalisasi. Hal ini ditandai dengan munculnya dualisme muktamar PKB antara PKB faksi Gus Dur yang diselenggarakan di Semarang dan PKB faksi “ulama” yang diselenggarakan di Surabaya. Kedua Mukatamr ini menghasilkan strktur kepengurusan yang sangat berbeda.

Proses intitusionalisasi faksi yang ada di PKB bermula dari gerakan politik faksi Gus Dur dalam mengkonsolidasikan diri dengan cara *reposisi* sejumlah kader PKB yang bergabung dalam faksi PKB Ulama. Sejumlah Ketua DPC (Dewan Pengurus Cabang) dan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk dalam daftar *reposisi* Gus Dur. Terutama Ketua DPW PKB Jatim Choirul Anam (Ketua Umum DPP PKNU) menjadi peletuk utama dalam mengkosolidasikan diri kedalam faksi PKB Ulama. *Cak Anam*, sebutan Choirul Anam, didukung penuh oleh sejumlah kiai khos yang tergabung dalam forum langitan untuk membuat PKB tandingan, yaitu PKB “ulama” (Fuad Anwar, 2004:64). Para ulama tersebutan merasa aspirasi politiknya sering kali tidak digubris oleh Gus Dur. Padahal mereka merupakan aktor penting dalam proses kampanye saat pemilu 2004. Hal ini menjadi alasan penting sikap politik kiai-kiai di Jawa Timur untuk pisah dengan PKB Gus Dur yang dinilai *monolitik* dan dianggap seagai institusionalisasi politik Gus Dur pribadi.

Selain aksi pemecatan Choirul Anam yang dikenal cukup dekat dengan kiai-kiai di Jawa Timur, Gus Dur juga melakukan pemecatan terhadap Ketua DPP PKB Alwi Sihab dan digantikan oleh Muhaimir Iskandar (DPP PKB). Selain itu, Sekjen PKB Syaifullah Yusuf juga dipecat oleh Gus Dur dan digantikan oleh Efendy Choiri. Persoalan ini semakin mendorong para kader PKB yang dipecat oleh Gus Dur mengkonsolidasikan diri untuk membuat PKB tandingan. Hal ini mengakibatkan munculnya dualisme keputusan Muktamar di PKB. Sebelumnya, pada Muktamar

(Kongres) PKB di Semarang memutuskan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro' dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB. Keputusan ini ditolak oleh PKB faksi ulama sehingga mereka mendirikan Mukhtar sendiri di Surabaya yang memutuskan Kiai Abdurrahman Chudluri sebagai Ketua Dewan Syuro' PKB dan Chiril Anam sebagai Ketua Umum DPP PKB (Sholahuddin Wahid, 2004:58).

Polarisasi Faksionalisme PKB : Lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Polarisasi faksionalisme partai politik merupakan tahapan terakhir kristalisasi faksi sehingga dalam tahap ini sudah dipastikan akan ada proses pemisahan partai sehingga muncul partai baru. Pasca munculnya dualisme PKB yang didasarkan atas masing-masing hasil keputusan Mukhtar antara PKB Gus Dur dan PKB Ulama, maka dualisme partai ini berujung pada legitimasi dari Mahkamah Agung terkait dengan partai yang sah hasil keputusan Mukhtar. Oleh karena itu, perseteruan kedua faksi dilanjutkan di pengadilan sebagai cara untuk memutuskan partai mana yang diakui oleh pemerintah. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya PKB Gus Dur dipastikan menang setelah keluar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengakui keputusan Mukhtar Semarang. Dengan keputusan ini, dipastikan kubu PKB ulama hasil Mukhtar Surabaya harus segera keluar dari PKB.

Tidak lama setelah dinyatakan kalah dari PKB Gus Dur, PKB Ulama hasil Mukhtar Surabaya langsung memproklamasikan diri sebagai partai baru bernama PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) pada tanggal 31 Maret 2007 di Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan, Widang, Tuban (Tempo, 2004). Kepastian atas deklarasi PKNU dilakukan setelah melalui beberapa kali pertemuan oleh Tim 17 yang beranggotakan kiai-kiai kharismatik di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti KH Ahmad Sofyan (Situbondo, Kediri), KH M Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), dan KH Chasbulloh Bawadi (Cilacap, Jawa Tengah), dan Ketua Dewan Syuro PKNU KH Abdurrahman Chudluri (Magelang, Jawa Tengah). Partai ini diklaim oleh sejumlah deklarator PKNU sebagai gerakan politik berbasis Islam Ahlussunnah Waljama'ah.

PKNU sebagai partai baru sempalan PKB berhasil masuk sebagai peserta pemilu tahun 2009 meskipun tidak lolos ambang batas suara dan parlemen. Meskipun begitu, PKNU masih memiliki kekuatan politik di daerah-daerah terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada Pemilu 2009 yang lalu, PKNU mendapatkan 126 kursi di DPRD Kab/Kota dan Provinsi (Tempo, 2004). Perolehan suara PKNU lebih banyak didapatkan melalui kantong-kantong *nahdliyyin* (warga NU) di daerah tapal kuda, seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Jember. Kemudian di wilayah Mataraman seperti di Tulungagung dan Trenggalek. Sedangkan di wilayah Madura juga banyak didapatkan oleh PKNU seperti di Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Selain itu, di wilayah Pantura, seperti di Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro juga menjadi lumbung suara PKNU.

Kesimpulan

Faksionalisme partai politik yang diakhiri dengan munculnya partai baru merupakan hasil akhir dari proses kristalisasi faksionalisme partai. Kristalisasi faksi bermula dari adanya konflik kepentingan antar elite partai sehingga muncul faksionalisme partai. Setelah faksi-faksi partai pada tahap fragmentasi sehingga mengkonsolidasikan diri sebagai faksi yang solid maka akan masuk pada tahap institusionalisasi faksi. Pada tahap ini faksi benar-benar telah terlembagakan dengan berbagai perangkat struktur keanggotaan didalamnya. Ketika faksi sudah terlembagakan pada tahap institusionalisasi partai, maka akan masuk pada tahap terakhir, yaitu polarisasi faksi dimana mulai ada pembelahan faksi sehingga muncul partai politik baru.

Deskripsi tentang kristalisasi faksionalisme partai yang ada pada kasus PKB sehingga lahir PKNU dapat dijadikan sebagai cara untuk melihat bagaimana dinamika internal partai politik sehingga muncul partai baru. Apa yang diperankan oleh faksi Gus Dur menunjukkan cirk faksi di Indonesia masih sangat personal. Pertukaran sumber daya antar aktor partai menjadi basis munculnya faksi personal di Indonesia. Munculnya faksi personal di Indonesia juga tidak lepas dari faktor ketokohan didalam partai politik sehingga *patronase politik* sangat kuat didalam partai politik. Ketika muncul tekanan faktor eksternal seperti kepentingan Pilpres, maka kemunculan faksi tidak bisa terhindarkan. Dengan demikian, faktor konflik kepentingan antar tokoh partai menjadi landasan bagi kemunculan faksi-faksi yang selanjutnya tumbuh partai-partai baru di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwar, Fuad. (2004). *Melawan Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Putra Bangsa, Al-Zastrouw. (1999). *Gus Dur Siapa Sih Sampean?*, Jakarta: Penerit Erlangga.
- Baehaqi, Imam (Peny). (1999). *Soeharto Lengser; Perspektif Luar Negeri*. Yogyakarta: LKis.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1990). *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES.
- Francoise Boecek. (2009). *Rethinking Factionalism: Typology, intra-Party Dynamics and Tree Face of Factionalism*, Political Organizations and Parties Section of the American Political Science Association, SAGE.
- Ida, Laode. (1996). *Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Patrick Kolner & Matthias Basedau, Matthias. (2005). *Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies*, Working Papers Global and Area Studies. Hunberg: Deutsches Ubersee-Intitut.
- Ridwan, Nur Kholiq dan Nurhasim, Ahmad. (2004) *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaharuan*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Wahid, Sholahuddin. (2004). *Membangun Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.